

SKRIPSI



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
*ILLEGAL LOGGING***

(Studi Kasus di Kabupaten Muna Tahun 2010 - 2013)

OLEH

ZUL RAMADHAN

B 111 10 048

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN

ILLEGAL LOGGING

(Studi Kasus di Kabupaten Muna Tahun 2010 - 2013)

OLEH:

ZUL RAMADHAN

B 111 10 048

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN ILLEGAL LOGGING

(Studi Kasus di Kabupaten Muna Tahun 2010 - 2013)

Disusun dan diajukan oleh

ZUL RAMADHAN

B 111 10 048

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 23 Mei 2014
Dan Dinyatakan Diterima


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19640824 199103 2 002

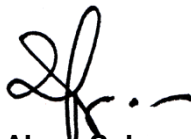
Sekretaris



Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : ZUL RAMADHAN

Nomor Induk : B 111 10 048

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
ILLEGAL LOGGING
(Studi Kasus di Kabupaten Muna Tahun 2010 - 2013)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

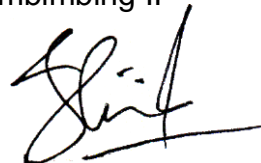
Makassar, April 2014

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19640824 199103 2 002

Pembimbing II



Hijrah Adhyanti M., S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Merangkan Bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : ZUL RAMADHAN

Nomor Induk : B 111 10 048

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN
ILLEGAL LOGGING
(Studi Kasus di Kabupaten Muna Tahun 2010 - 2013)

Memenuhi syarat dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2014

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

ZUL RAMADHAN (B111 10 048), **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Muna Tahun 2010-2013”** di bawah bimbingan Muhadar sebagai Pembimbing I, dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna pada tahun 2010 hingga 2013, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muna, dengan memilih tempat penelitian di Polres Muna, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, dan Masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna yakni: 1. Kepentingan Ekonomi, 2. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hutan; Selanjutnya yang menjadi upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging* yaitu: 1. Upaya Pre-emptif yakni: a. Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang pemahaman hukum, risiko dari kerusakan hutan, dan pemanfaatan hutan secara prosedural kepada masyarakat dan internal penegak hukum; b. Memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho, menghimbau lewat media cetak atau media elektronik tentang pentingnya kelestarian Hutan Lindung Jompi di Kabupaten Muna. 2. Upaya Preventif yakni tetap siaga, turut aktif dan tanggap dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan *illegal logging*, dengan bekerja sama dan meningkatkan koordinasi terhadap personil Polisi Hutan yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan dan laut, melakukan pengamanan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan, dan melakukan penjagaan titik rawan peredaran hasil hutan antara lain: industri pengolahan kayu, pelabuhan penyebrangan dan lain-lain. 3. Upaya Represif yakni mengamankan terlebih dulu yang diduga kuat sebagai pelaku kejahatan *illegal logging* dan selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap setiap kasus kejahatan *illegal logging*. Setiap kasus kejahatan *illegal logging* yang tuntas dalam tahap penyidikan dilimpahkan kekejaksaan dan kemudian untuk diadili dipengadilan dengan sanksi seberat-beratnya. Selain hal tersebut di atas, hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan secara maksimal yaitu memberdayakan masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi dan melakukan reboisasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya kepada Allah *Azzawa jala*, terucap dari lubuk hati penulis yang menghamba. Sungguh, karena Dia-lah karya kecil ini yakni Skripsi yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN MUNA TAHUN 2010-2013” selesai, tumbuh dalam kesempurnaannya yang tidak sempurna. Skripsi ini disusun sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Strata-1. Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad, SAW. cintanya yang agung kepada Sang Pencipta dan kepada sesama makhluk adalah inspirasi cinta sejati yang tak ada bandingnya dalam sejarah umat manusia.

Pada kesempatan ini, sudah semestinya penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda **Basna** dan ibunda **Wa Lufini** dengan tetes keringat mereka bekerja adalah untaian mutiara dan doa yang mengalir tiada henti, membasahi jiwa penulis dengan cinta, kerinduan dan kasih sayang. Dengan semangat, keringat dan doa mereka berhasil menyekolahkan penulis pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.** selaku Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan sekaligus selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Romi Librayanto, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II penulisyakni **Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.** dan **Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.** yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Para penguji yang terdiri atas **Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., dan Hj. Haeranah, S.H., M.H.** yang telah bersedia memberikan saran-saran perbaikan untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Bapak **Ismail Alrip, S.H., M.H.** selaku penasihat akademik penulis yang selalu memberikan masukan, arahan serta motivasi kepada penulis.

10. Bapak dan Ibu **staf pengajar** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanpa terkecuali.
11. Kepala **Polres Muna**, Kepala Unit Reskrim, dan seluruh staf **Polres Muna**.
12. Kepala **Dinas Kehutanan Kabupaten Muna** dan seluruh staf **Dinas Kehutanan Kabupaten Muna**.
13. Teman-teman dan sahabat-sahabat seperjuangan **Legitimasi 10** yang telah memberikan banyak pengalaman dan persaudaraan.
14. Teman-teman **Fadisari Crew** dan spesial buat **Belleng (Lia)**, **Stewar (Cici)**, **Algifari** serta **Ami**, betapa indahnya kebersamaan kita yang disampul dengan rasa persaudaraan.
15. Teman-teman **seposko KKN** di Desa Sangtandung, dan teman-teman KKN sekecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
16. **Kepala Desa Sangtandung**, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu beserta seluruh **warga desa Sangtandung** yang telah memberikan banyak inspirasi kepada penulis.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih dengan segala ketulusan serta penghargaan yang setinggi-tingginya, teristimewa secara khusus kepada:

1. Kakak-Kakakku **Alfin** dan isterinya **Wa Ode Analia**; **Risna** dan suaminya **La Sitari**; **Laskar** dan isterinya **Citra**; **Rita** dan suaminya **La Sana** yang selalu memberikan motivasi serta pesan-pesan pemicu

semangat penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin ini.

2. Keponakan-Keponakanku **Muis, Ikra, Sawir, Aisyah, Wahid, Rahid, Mukmin,** dan **Safiah** kalianlah motivasi untuk memperlihatkan hal-hal baik selalu hadir.
3. Sahabat-sahabat dari tanah kelahiranku "*Witeno Wuna*" **K'Asbar, K'Jamsir, K'Oman, K'Agus, K'Hamzah, K'Adam, Mhanto, Rizal, Farit, Asa, Latif, Alunk, Afandi HR, Said, Awink, Bangun, Gagat,** dan lain-lain yang penulis tidak sempat cantumkan namanya pada kesempatan ini semoga tetap dalam persaudaraan dan tetap semangat menuju kesuksesan.
4. Kakanda **Samsuddin, S.Pd.,M.Hum.** dan asistennya si bajak laut (**Tam**), indahnyanya kebersamaan bagaikan "*Tomi-Tomi*" menemukan "*Wangkuworio*" di tiang baruga.

Terakhir, sekaligus yang terpenting adalah pembaca terhormat. Melalui Andalah, karya ini mudah-mudahan bisa bermakna dan bermetaforfosa menjadi kupu-kupu yang apapun warnanya bisa mempercantik kehidupan. Kritik, komentar dan saran, penulis terima dengan pikiran terbuka. Semoga dapat bermanfaat. Amiin..

Makassar, Mei 2014

Penulis
ZUL RAMADHAN

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian	6
1. Pengertian Kriminologi.....	6
2. Pengertian Kejahatan	8
3. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	11
B. Tinjauan Umum Perlindungan Hutan	15
1. Tujuan Perlindungan Hutan	15
2. Macam Perlindungan Hutan	15

3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan.....	16
4. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan	17
C. Ketentuan Pidana terhadap Kejahatan <i>Illegal Logging</i>	19
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	20
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ...	26
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	44
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan	47
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	48
6. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi	54
D. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.....	59
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	68

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	69
B. Jenis Dan Sumber Data	69
C. Teknik Pengumpulan Data	69
D. Analisis Data	70

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Muna	71
1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	71
2. Data Kasus Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Muna	88
3. Faktor Penyebab Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Muna	91
B. Upaya Penanggulangan kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Muna	100

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Hal
1.	Tabel 1. Kawasan Hutan Kabupaten Muna.....	72
2.	Tabel 2. Luas wilayah dan kepadatan penduduk kecamatan di sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi.....	77
3.	Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga (RT) dan tingkat kepadatan RT di kecamatan sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi.....	78
4.	Tabel 4. Sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Muna menurut status kepegawaiannya.....	79
5.	Tabel 5. Sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berdasarkan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil atau Golongan Kepegawaiannya.....	79
6.	Tabel 6. Sumber daya Manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berdasarkan tingkat pendidikan dan profesinya.....	80
7.	Tabel 7. Data Jabatan dan tugas pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.....	81
8.	Tabel 8. Kasus Kejahatan <i>Illegal Logging</i> Kabupaten Muna.....	88
9.	Tabel 9. Kasus Kejahatan <i>Illegal Logging</i> Khusus dalam Kawasan Hutan Lindung Jompi.....	89

DAFTAR GAMBAR

No	Nama Gambar	Hal
1.	Gambar 1. Kondisihutan Lindung Jompi.....	73
2.	Gambar 2. Kasus Kejahatan <i>Illegal Logging</i> di Kabupaten Muna.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.

Kekayaan alam yang berupa hutan juga merupakan penopang keberhasilan pembangunan di Indonesia, sehingga perlu digali dan dimanfaatkan secara optimal. Mengenai hal itu, Supriadi mengemukakan bahwa:¹

“kalau hutan yang terdapat di suatu daerah telah mengalami penurunan yang sangat dratis, secara otomatis akan berdampak

¹ Supriadi, *Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cetakan ke-2, hlm. 113.

negatif terhadap kehidupan, khususnya masyarakat, misalnya akan terjadi kekeringan apabila musim kemarau, akan terjadi banjir kalau musim hujan. Oleh karena itu, pengelolaan hutan ini sangat penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Selain itu, tujuan pengelolaan hutan ini, sasarannya agar menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan, baik konflik antara pemerintah dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, dan konflik yang terjadi antara pemegang hak pengusaha hutan (HPH) dengan masyarakat, terutama pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung”.

Sehubungan dengan itu Salim H.S. dalam bukunya menguraikan manfaat hutan sebagai berikut: ²

“Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil-hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu dan lain-lain. Sementara itu, ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain : mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, menampung tenaga kerja, menambah devisa negara dan manfaat di bidang pertahanan / keamanan”.

Untuk itu kawasan hutan menjadi sangat penting untuk dijaga dan dimanfaatkan secara optimal. Alam Setia Zein mengatakan bahwa: ³

“Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.

² Salim H.S, *Dasar-dasar Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Cetakan ke-5, hlm. 1.

³ Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm. 6.

Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan banyak ditemui kasus yang pelakunya adalah orang atau warga masyarakat dengan alasan ekonomi. Orang-orang tersebut melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin yang kemudian ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan Pasal 50 dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Namun, terdapat pula aktifitas *illegal logging* yang berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas tersebut. Modus ini biasanya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak yang secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi).

Terharu, itulah istilah kata yang tepat bagi penulis untuk menyampaikan kepada semua pihak setelah melihat yang telah terjadi di Kabupaten Muna. Bahwa Kabupaten Muna yang semula dikenal dengan istilah Kota Jati, kini itu nyaris hanya sebagai cerita. Maraknya *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Muna membuat lahan-lahan sebagai hutan lindung kian menipis. Untuk melihat bukti nyatanya yang terjadi, diantaranya dapat lihat pada Hutan Lindung Jompi yang

terletak di sekitar kota Raha yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Muna. Kini, menurut pengamatan penulis hutan lindung tersebut sebagian besar telah digarap untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. Luas Hutan Lindung Jompi 1927 Hektar (ha) atau 0,7 % dari luas wilayah Kabupaten Muna, namun saat ini telah mengalami kerusakan yang serius, \pm 1.343 ha atau 70 % dari luas Hutan Lindung Jompi sudah rusak dan \pm 274 ha atau 14 % dari luas Hutan Lindung Jompi terancam rusak dan \pm 310 ha atau 16 % dari luas Hutan Lindung Jompi dalam keadaan aman.⁴

Jika hal ini dibiarkan terus menerus akan berakibat fatal, khususnya masyarakat sekitar, dalam hal ini masyarakat kota Raha. Hal itu dikarenakan dalam Hutan Lindung Jompi terdapat mata air yang digunakan sebagai sumber air bersih khususnya bagi masyarakat setempat dan telah dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Jika *illegal logging* ini dibiarkan maka akan berdampak fatal, yaitu kekeringan. Hal ini tentunya membawa masyarakat setempat kesulitan akan adanya air bersih.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan *illegal logging* di Kabupaten Muna dengan judul skripsi Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan *Illegal Logging* (Studi Kasus di Kabupaten Muna Tahun 2010 – 2013).

⁴ Data Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2013

B. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna ?
2. Apakah upaya-upaya penanggulangan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama yang menyangkut masalah kejahatan *illegal logging*.
2. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, khususnya masyarakat kabupaten Muna akan risiko terhadap kejahatan *illegal logging*.
3. Untuk memperluas wawasan pengetahuan penulis dan lebih mengetahui tentang penerapan ilmu yang telah diperoleh penulis semasa perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁵

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:⁶

- 1) Edwin H. Sutherland: *Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- 2) W.A. Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 3) J. Constant: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- 4) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

⁵ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010, Cetakan Ke-1, hlm. 1.

⁶ *Ibid.*, hlm 1-2.

Terlepas dari pendefinisian kriminologi itu sendiri, W.A. Bonger ⁷ memberikan pembagian terhadap kriminologi, yakni kriminologi murni dan kriminologi terapan. Kriminologi murni terdiri atas:

- 1) Antropologi Kriminal
ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- 2) Sosiologi Kriminal
ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 3) Psikologi Kriminal
ialah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal
ialah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- 5) Penologi
ialah Ilmu tentang tumbuh dan berkembangannya hukuman.

Adapun kriminologi terapan pembagiannya sebagai berikut:

- 1) Higiene Kriminal
Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Politik Kriminal
Usaha penanggulangan kejahatan di tempat kejahatan itu sendiri. Ilmu ini juga melihat sebab-musabab seseorang melakukan kejahatan.
- 3) *Criminalistic Politics Scientific*
Ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan dan pengusutan kejahatan.

⁷ W.A. Bonger dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cetakan Ke-12, hlm. 9-10.

Selain W.A. Bonger yang melakukan pembagian terhadap kriminologi, kriminologi juga dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama oleh Edwin H. Sutherland yaitu:⁸

- 1) Sosiologi Hukum
Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan terus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- 2) Etiologi Hukum
Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- 3) Penologi
Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Edwin H. Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.

2. Pengertian Kejahatan

Kejahatan sudah dikenal sejak adanya peradaban manusia. Makin tinggi peradaban, makin banyak aturan, dan makin banyak pula pelanggaran. Sering disebut bahwa kejahatan merupakan bayangan peradaban (*crime is a shadow of civilization*).⁹

Secara etimologi, kejahatan merupakan suatu perbuatan manusia yang mempunyai sifat jahat sebagaimana bila orang membunuh, mencuri, merampok, menipu, korupsi dan lain-lain. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara. Adapun dalam Kitab Undang-

⁸ Edwin H. Sutherland, dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Cetakan Ke-12, hlm.11.

⁹ A.S. Alam, Op.Cit., 15.

Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dijelaskan pengertian kejahatan secara mendetail, akan tetapi kejahatan itu diatur dalam buku dua KUHP yaitu Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 KUHP.

R. Soesilo dalam bukunya menyebutkan bahwa:¹⁰

“Kejahatan secara yuridis adalah kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP. Misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHP yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun)”.

Adapun Edwin H. Sutherland menekankan bahwa:¹¹

“Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.

Selanjutnya W.A. Bonger menyatakan bahwa:¹²

“Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan”.

Lebih lanjut A.S. Alam memberikan dua sudut pandang tentang kejahatan, yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-

¹⁰ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politea, 1985, hlm. 13.

¹¹ Edwin H. Sutherland, *Op.Cit.*, 14.

¹² W.A. Bonger, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹³ A.S. Alam, *Op.Cit.*, 16.

undangan pidana, perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Contoh konkrit dalam hal ini adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari definisi hukum, perbuatan wanita tersebut bukan kejahatan karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya melacurkan diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, kesusilaan, dan lain-lainnya. Namun perbuatan itu tetap bukan kejahatan dilihat dari definisi hukum, karena tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Contoh di dalam hal ini adalah bila seseorang muslimin meminum minuman keras sampai mabuk. Perbuatan itu merupakan dosa (kejahatan) dari sudut pandang masyarakat islam, dan namun dari sudut pandang hukum bukan kejahatan.

Seirama dengan A.S. Alam yang telah memberi dua sudut pandang dalam memberi penjelasan tentang kejahatan, Gerson W. Bawengan membagi pula tiga pengertian kejahatan menurut penggunaannya masing-masing, yaitu:¹⁴

- 1) Pengertian secara praktis
Kejahatan dalam pengertian ini adalah suatu pengertian yang merupakan pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman maupun pengecualian.
- 2) Pengertian secara religius
Kejahatan dalam arti religius ini mengidentifikasikan arti kejahatan dengan dosa, dan setiap dosa terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.
- 3) Pengertian secara yuridis
Kejahatan dalam arti yuridis disini, maka kita dapat melihat misalnya dalam KUHP hanyalah setiap perbuatan

¹⁴ Gerson W. Bawengan dalam bukunya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2001, hlm. 27.

yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, itulah yang disebut kejahatan. Selain KUHP, kita dapat menjumpai hukum pidana Khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan lain yang menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan.

Hal itu sejalan dengan A.Qirom Syamsuddin dan E. sumaryono yang memberikan penjelasan mengenai kejahatan sebagai berikut:¹⁵

- 1) Segi sosiologi
Kejahatan yang ditekankan pada ciri-ciri khas yang dapat dirasakan dan diketahui oleh masyarakat tertentu. Masalahnya terletak pada perbuatan amoral yang dipandang secara objektif, yaitu jika dari sudut masyarakat dimana masyarakat dirugikan.
- 2) Segi psikologi
Kejahatan merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma- norma yang berlaku di masyarakat.
- 3) Segi yuridis
Kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pendefinisian suatu kejahatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun hal pokok dari suatu kejahatan adalah sikap, perilaku, dan tindakan yang telah bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat dan/atau sikap, perilaku, dan tindakan yang telah dirumuskan oleh negara sebagai kejahatan.

3. Pengertian *Illegal Logging*

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan

¹⁵ A.Qirom Syamsuddin dan E. sumaryono, dalam bukunya Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Jakarta: PT. Refika Aditama, 2001, hlm. 18.

tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam ¹⁶*The Contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam ¹⁷*Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya *forbidden by law; unlawful* artinya dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan *logging* artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹⁸

Sementara itu, berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut Sukardi menyimpulkan bahwa:¹⁹

“*Illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum”.

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanujung Putting, istilah *illegal logging* disamakan dengan istilah penebangan kayu illegal.

Definisi lain dari penebangan liar adalah berasal dari temu karya yang diselenggarakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Telapak tahun 2002 yaitu;

¹⁶ Salim, P., *the Contemporary English Indonesian Dictionary*, Edisi keenam, Modern English Press: Jakarta, 1987, hlm. 925.

¹⁷ Garner, B.A., *Blak’s Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group: Dallas Texas, 1999, hlm. 750.

¹⁸ Salim, P., Op.Cit., 1094.

¹⁹ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, cetakan Pertama, 2005, hlm. 72.

“*Illegal logging* adalah operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak”.²⁰

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memberikan pengertian tentang pembalakan liar yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.

Illegal Logging identik dengan istilah pembalakan *illegal* yang digunakan oleh *Foerst Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* (GFW) yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih lanjut FWI memaknai *illegal logging* menjadi dua yaitu;²¹

1. Yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya.
2. Melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Bertitik tolak dari pengertian *illegal logging* di atas, pengertian *illegal logging* diberikan oleh Rahmawati Hidayati dkk. mengatakan bahwa:

“*Illegal logging* berdasarkan terminologi bahasa berasal dari dua suku kata, yaitu *illegal* yang berarti praktik tidak sah dan *logging* yang berarti pembalakan atau pemanenan kayu.

²⁰ Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>,: (diakses tanggal 5 November 2003), hlm. 3.

²¹ FWI dan GFW, *Potret Keadaan Hutan Indonesia, Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch*: Bogor, edisi ketiga, 2001, hlm. 36.

Dengan demikian *illegal logging* dapat diartikan sebagai praktik pemanenan kayu yang tidak sah. Dari aspek simplikasi semantik *illegal logging* sering diartikan sebagai praktik penebangan liar. Adapun dari aspek integratif, *illegal logging* diartikan sebagai praktik pemanenan kayu beserta prosesnya secara tidak sah atau tidak mengikuti prosedur dan tata cara yang telah ditetapkan. Proses tersebut mulai dari kegiatan perencanaan, perjanjian, permodalan, aktifitas memanen, hingga pasca pemanenan yang meliputi pengangkutan, tata niaga, pengolahan, hingga penyelundupan.²²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana merusak hutan adalah merupakan kejahatan. Selaras dengan hal tersebut IGM. Nurdjana dkk. Menjelaskan bahwa:²³

“Perbuatan *Illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini

²² Rahmi Hidayati D, dkk, *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*, Wana Aksara, Tangerang, 2006, hlm. 128.

²³ IGM. Nurdjana dkk., *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008, Cetakan Ke-3. hlm. 19.

merupakan ancaman yang potensial bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dampaknyapun tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan saja, namun dirasakan secara regional, nasional, dan internasional”.

B. Tinjauan Umum Perlindungan Hutan

1. Tujuan Perlindungan Hutan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menguraikan bahwa Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:²⁴

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

2. Macam Perlindungan Hutan

Pasal 46 sampai dengan pasal 51 UU Kehutanan ditentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas:

1. Hutan,
2. Kawasan hutan,
3. Hasil hutan, dan
4. Investasi.

²⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 47.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu:

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya,
2. Perlindungan tanah hutan,
3. Perlindungan terhadap kerusakan hutan, dan
4. Perlindungan hasil hutan.

3. Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, yang meliputi: Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing.²⁵

Pejabat yang diberikan wewenang khusus dalam bidang kepolisian adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dibidang kehutanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

²⁵ Salim H.S, *Op Cit.*, hlm.120.

Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4. Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Hutan

Keberhasilan pembangunan di bidang kehutanan tidak saja ditentukan oleh aparatur yang cakap dan terampil, tetapi harus juga didukung dengan peran serta masyarakat. Sebagaimana Salim, H.S. menjelaskan bahwa:²⁶

“Informasi yang diberikan/disampaikan masyarakat kepada Pemerintah beserta alat perlengkapannya sangat penting, karena dengan adanya informasi tersebut Pemerintah dapat merencanakan peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan secara serba guna dan lestari diseluruh Indonesia. Sedangkan manfaat bagi masyarakat yang telah ikut berperan serta dalam bidang kehutanan atau cenderung untuk memperhatikan kesediaan yang lebih besar guna menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan”.

Di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan diatur tentang peran serta masyarakat. Peran serta itu ditujukan kepada masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan diwajibkan ikut serta dalam usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan. Di dalam penjelasan pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 disebutkan bahwa:

“Hutan sebagai kekayaan yang memberikan manfaat sosial ekonomi dan berfungsi menjaga keseimbangan lingkungan hidup, perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya oleh setiap

²⁶ Salim H.S, *Ibid*, hlm.122.

anggota masyarakat. Oleh karena itu, setiap orang dan terutama bagi yang tinggal disekitar hutan wajib membantu mencegah dan memamdamkan kebakaran hutan”.

Selain itu, di dalam pasal 69 UU Kehutanan ditentukan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.

Di samping itu juga, di dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) juga telah diatur tentang peran serta masyarakat.

Pasal 5 UUPLH berbunyi:

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 UUPLH berbunyi:

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 7 UUPLH berbunyi:

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) di atas, dilakukan dengan cara:
 - (1) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - (2) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;

- (3) menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- (4) memberikan saran pendapat;
- (5) menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan undang-undang baru mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan cara:

- a. membentuk dan membangun jejaring sosial gerakan anti perusakan hutan;
- b. melibatkan dan menjadi mitra lembaga pemberantasan perusakan hutan dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- c. meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelestarian hutan dan dampak negatif perusakan hutan;
- d. memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- e. ikut serta melakukan pengawasan dalam penegakan hukum pemberantasan perusakan hutan; dan/atau
- f. melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

C. Ketentuan Pidana Terhadap Kejahatan *Illegal Logging*

Berikut ini dideskripsikan ketentuan pidana dari perundang-undangan yang merupakan *lex specialis* terhadap urusan-urusan di bidang kehutanan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* dan ketentuan pidana

diluar perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang kehutanan namun ada kaitannya dengan kejahatan *illegal logging*, yaitu antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU Kehutanan, adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu.²⁷ Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

Ada tiga jenis pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis pidana ini dapat dijatuhkan kepada pelaku secara kumulatif. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 UU Kehutanan. Jenis pidana itu

²⁷ Penjelasan umum paragraf ke-18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melakukan kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UU Kehutanan.

Uraian tentang ketentuan pidana dan sanksinya terhadap kejahatan *illegal logging* menurut UU Kehutanan adalah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 50 ayat (1), (2), dan (3) UU Kehutanan berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Merambah kawasan hutan;
 - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
 - d. Membakar hutan;
 - e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari

kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Ketentuan Pasal 78 UU Kehutanan berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
- (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
- (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Dari uraian tentang rumusan ketentuan pidana dan sanksinya yang diatur oleh UU Kehutanan tersebut di atas, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

- 1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha.
- 2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya.
- 3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :
 - a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
 - b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.

- c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang undang.
- d. Menebang pohon tanpa izin.
- e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
- f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Melihat rumusan dari unsur-unsur Pasal tersebut mencerminkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini.

IGM. Nurdjana dkk. menguraikan dalam bukunya bahwa:²⁸

“Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana UU Kehutanan belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*. Memang sangat efektif untuk diterapkan kepada pelaku, terutama masyarakat yang melakukan pencurian kayu atau penebangan kayu secara *illegal*. Akan tetapi keterlibatan pegawai negeri baik sipil maupun militer, pejabat serta aparat pemerintah lainnya baik selaku pemegang saham dalam perusahaan penebangan kayu, maupun yang secara langsung melakukan kegiatan bisnis kayu belum dapat terjangkau oleh ketentuan pidana dalam UU Kehutanan tersebut, sehingga hasilnya kemudian tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat”.

²⁸ IGM. Nurdjana dkk., *Op Cit.*, hlm.113.

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Upaya menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang agar perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan undang-undang baru yang diharapkan mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.

Adapun ketentuan pidana dalam undang-undang ini terdapat dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 sebagaimana berikut:

Pasal 82

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b; dan/atau
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 83

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;

- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang:
- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
 - b. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
 - c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 84

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat

yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 85

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 86

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau

- b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i; dan/atau
- b. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 87

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
- c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;

- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Korporasi yang:
- a. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf k;
 - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l; dan/atau
 - c. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf m dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 88

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
- c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 89

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau

- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 90

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
 - a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau
 - b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang:
 - a. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam

kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d; dan/atau

- b. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b; dan/atau
- b. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 93

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;

- b. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c;
- b. menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d; dan/atau
- c. membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 94

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a;
- b. melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c;
- c. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d; dan/atau
- d. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 95

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;
- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g;

- b. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h; dan/atau
- c. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf i dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 96

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Korporasi yang:

- a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a;
- b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b; dan/atau
- c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)

dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 97

(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Korporasi yang:

- a. merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25; dan/atau
- b. merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 98

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Korporasi yang turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Orang perseorangan yang karena kelalaiannya menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

Pasal 100

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 101

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan serta paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Korporasi yang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 102

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan,

atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Korporasi yang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 103

- (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Korporasi yang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 104

Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 105

Setiap pejabat yang:

- a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a;
- b. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau izin penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b;
- c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
- d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
- e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
- f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f; dan/atau
- g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi tindak pidana pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 106

Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 107

Setiap kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 20 sampai dengan Pasal 26 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 108

Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94, Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105, atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi, terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pasal 109

- (1) Dalam hal perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Perbuatan pembalakan, pemanenan, pemungutan, penguasaan, pengangkutan, dan peredaran kayu hasil tebangan liar dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik secara sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi agar menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan agar pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (5) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103.
- (6) Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 103, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Dalam UU No. 5 Tahun 1990 ini, diatur dua macam tindak pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40

ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4), sedangkan unsur-unsur tindak pidananya diatur dalam Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 33 UU No. 5 Tahun 1990, yaitu sebagai berikut:

Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk:
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi

atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1

- (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

Ada dua jenis pidana menurut Pasal 18 PP No. 28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidananya ada empat yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 ini diatur dalam Pasal 18, yaitu sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) dalam hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung dan Pasal 10 ayat (1) dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) atau Pasal 9 ayat (2) di dalam hutan

yang bukan hutan lindung, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau dengan sebanyak-banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

(3) Barang siapa:

- a. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2), atau Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atau Pasal 8 ayat (2); atau
- b. karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran hutan; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(4) Barang siapa dengan sengaja:

- a. melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2);
- b. melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3);
- c. melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1);
- d. memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), sedang hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya; dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah kejahatan, sedangkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) adalah pelanggaran.

(7) Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau benda yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dapat dirampas untuk Negara.

5. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu:

1) Pengrusakan (Pasal 406, Pasal 407, dan Pasal 412)

Pasal 406

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Pasal 407

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- (2) Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam Pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku.

Pasal 412

“Jika salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidana ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang dirumuskan Pasal 407 ayat pertama”.

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam sistem pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian fungsi hutan. Sehubungan dengan

hal itu, IGM. Nurdjana dkk. menjelaskan dalam bukunya bahwa.²⁹

“Illegal logging pada hakikatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada, baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over catting* atau penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki”.

2) Pencurian (Pasal 362)

Pasal 362

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Jelas bahwa menebang dan mengambil kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum berarti kegiatan melawan hukum.

3) Penggelapan (Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375)

Pasal 372

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pasal 374

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena

²⁹ *Ibid.*, hlm. 120.

mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Pasal 375

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Modus penggelapan dalam kejahatan *illegal logging* seperti yang dijelaskan IGM. Nurdjana dkk. antara lain seperti *over cutting* yaitu penebangan di luar konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (*over capacity*), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan izin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSHH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.³⁰

4) Penadahan (Pasal 480 dan Pasal 481)

Pasal 480

“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

Pasal 481

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dan kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu *illegal* baik di dalam maupun di luar negeri, bahkan terhadap kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku, baik penjual maupun pembeli.³¹

5) Pemalsuan Surat (Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 266)

Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;

³¹ *Ibid.*, hlm. 124.

2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, IGM.

Nurdjana dkk. mengungkapkan bahwa salah satu *modus operandi* yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan SKSHH, pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan palsu dalam

SKSHH. *Modus operandi* ini belum diatur secara tegas dalam UU Kehutanan.³²

6) Penyelundupan

Menurut IGM. Nurdjana dkk. bahwa:³³

“Kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara *illegal*) menjadi bagian dari kejahatan *illegal logging*. Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-undangan tentang ketentuan pidana kehutanan”.

6. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging*, IGM. Nurdjana dkk. menguraikan dalam bukunya bahwa:³⁴

“Dalam kejahatan *illegal logging* terdapat juga kejahatan lain seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan *illegal* tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging* yang juga merugikan keuangan dan perekonomian negara baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Demikian juga unsur-unsur kolusi seperti suap menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik *illegal logging*”.

Beberapa kalangan menialai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan *illegal logging*. Menurut pendapat

³² *Ibid.*, hlm. 123.

³³ *Ibid.*, hlm. 121-122.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

direktur eksekutif LSM Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Ginting bahwa.³⁵

“Akar permasalahan dari *illegal logging* adalah karena korupsi, hal ini terlihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh birokrasi pemerintah dan lain-lain”.

Sehubungan dengan hal itu, IGM. Nurdjana dkk. dalam bukunya mengungkapkan bahwa:³⁶

“Praktik-praktik KKN dalam kejahatan *illegal logging* inilah yang dapat tersentuh oleh penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan *illegal logging*, sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju pada pelaku masyarakat kecil yang hanya diupah untuk melakukan kegiatan *illegal* tersebut, namun otak dari kejahatan *illegal logging* itu tidak tersentuh oleh hukum”.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi) yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *illegal logging* antara lain:

Ketentuan Pasal 5 yaitu:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

³⁵ Ginting L., *Korupsi adalah Inti dari Illegal Logging*, dari webpage (www.APIndonesia.com), hlm 1: (diakses tanggal 11 November 2003) dalam bukunya IGM. Nurdjana dkk., *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2008, Cetakan Ke-3. hlm. 125.

³⁶ IGM. Nurdjana dkk., *Op Cit.*, hlm. 125.

- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan pasal 6 yaitu:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan Pasal 8 yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Ketentuan Pasal 9 yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Ketentuan Pasal 11 yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya”.

Ketentuan Pasal 12 yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

UU Korupsi merupakan undang-undang khusus tentang tindak pidana korupsi dan mengatur secara khusus perbuatan

pidana terhadap pegawai negeri. Oleh karena itu, IGM. Nurdjana dkk. dalam bukunya menjelaskan bahwa:³⁷

“Sepanjang UU Kehutanan sebagai *lex specialis* belum mengatur secara khusus tentang kejahatan *illegal logging* yang melibatkan pegawai negeri atau pejabat penyelenggara lainnya, dan untuk menjaga kekosongan hukum, maka UU Korupsi dapat diterapkan kepada pelaku pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan *illegal logging*. Akan tetapi sasaran penegakan hukum itu terutama hanya ditujukan pada tindak pidana korupsinya dan bukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan hutan”.

D. Teori Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangan dunia kriminologi terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan.

Made Darma Weda³⁸ mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut :

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 129

³⁸ Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 15-20

mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria bahwa:³⁹

“Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*”.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut, setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

2. Teori Neo Klasik.

Menurut Made Darma Weda bahwa:⁴⁰

“Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik, dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-parbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum”.

Ciri khas teori neo klasik adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas.

Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:

³⁹ Beccaria, dalam bukunya Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 15

⁴⁰ Weda, Made Darma, *Op.Cit.*, hlm. 15

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 15

- a. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - b. Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- 2) Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang berubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- 3) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja, sebab-sebab utama untuk mempertanggung jawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- 4) Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan salah.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori kartografi yang berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut Made Darma Weda bahwa: ⁴²

“Dalam teori ini kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri”.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini bahwa “kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.”⁴³

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 16

⁴³ *Ibid.*, hlm. 16

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang enam teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-tipologis. Keenam aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keenam teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso bahwa:⁴⁴

“Kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*)”.

Selanjutnya ia mengatakan bahwa:⁴⁵

“Ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya”.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso yaitu:⁴⁶

- a. Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- b. Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- c. Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal

⁴⁴ Cesare Lombroso, dalam bukunya Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 16

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 16

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 16

- kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- d. Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
 - e. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*.

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa:⁴⁷

“Tidak ada tanda- tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe”.

Menurut Goring bahwa:⁴⁸

“Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.”

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

⁴⁷ Goring, dalam bukunya Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 18

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 18

2) Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard bahwa:⁴⁹

“Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya, dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum”.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

3) Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi bahwa:⁵⁰

“Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan. Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial”.

⁴⁹ Goddard, dalam bukunya Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 18

⁵⁰ Weda, Made Darma, *Op.Cit.*, hlm. 19

4) Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis.

Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).⁵¹ Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

5) Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis.

Menurut Tarde bahwa:⁵²

“Teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.”

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku- buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 19.

⁵² Tarde, dalam bukunya Weda, Made Darma, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo, 1996, hlm. 20.

promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Menurut Tarde bahwa:⁵³

“Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation”.

Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6) Teori Biososiologi

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Menurut Made Darma Weda, bahwa:⁵⁴

“Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR)”.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵⁴ Weda, Made Darma, *Op.Cit.*, hlm. 20.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Sebagaimana yang diungkapkan A.S. Alam bahwa penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:⁵⁵

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu; Niat + Kesempatan terjadinya Kejahatan. Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun waktu itu tidak polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney, dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

⁵⁵ A.S.Alam, *Op.Cit.*, hlm. 79-80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Muna, khususnya pada Kantor Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Muna, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, dan masyarakat setempat (masyarakat yang bermukim disekitar kawasan hutan, khususnya Hutan Lindung Jompi). Lokasi-lokasi tersebut dijadikannya objek penelitian karena relevan dengan judul skripsi penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Data Primer, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan beberapa pihak yang terkait dengan kasus ini yaitu pihak dinas kehutanan,

kepolisian dan pelaku kejahatan *illegal logging* atau masyarakat sekitar hutan.

2. Untuk Data Sekunder, yakni pengumpulan datanya dilakukan dengan cara penelusuran dan menelaah buku-buku, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan penulisan skripsi ini.

D. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Muna

1. Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Muna merupakan daerah kepulauan yang terletak di jazirah Sulawesi Tenggara meliputi bagian utara Pulau Buton dan Pulau Muna. Secara geografis Kabupaten Muna terletak di bagian Selatan Khatulistiwa pada garis lintang 4⁰06' sampai 5⁰15' Lintang Selatan dan 122⁰8' Bujur Timur sampai dengan 123⁰15' Bujur Timur. Luas daratan Kabupaten Muna adalah sebesar 2.963,97 km² atau 296.397 ha. Luas tersebut dibagi menjadi 33 kecamatan, yang terdiri dari 205 desa, 31 kelurahan, dan 3 (tiga) Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT).

Wilayah Kabupaten Muna memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 1) Bagian Utara Kabupaten Muna berbatasan dengan Selat Spelman,
- 2) Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Buton Utara,
- 3) Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton, dan
- 4) Bagian Barat berbatasan dengan Selat Tiworo.

a. Keadaan Kawasan Hutan Lindung Jompi

Lokasi Kawasan Hutan Lindung Jompi berada di daratan Pulau Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Secara astronomis kawasan ini terletak di antara antara 4°45' hingga 4°55' garis Lintang Selatan; dan di antara 122°38' hingga 122°46' garis Bujur Timur.

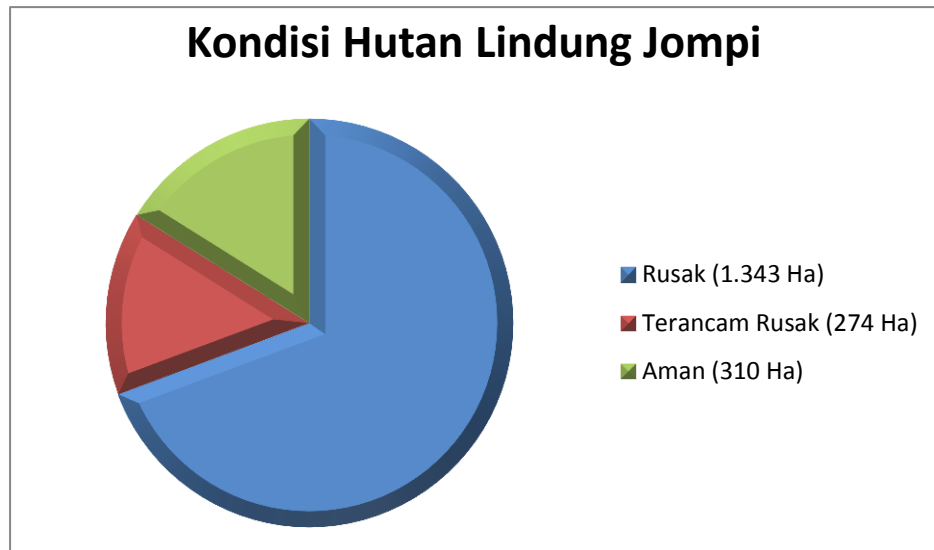
Secara administrasi Kawasan Hutan Lindung Jompi berada di wilayah Kabupaten Muna yang bersentuhan langsung dengan lima kecamatan yaitu: Kecamatan Batalaiworu, Katobu, Duruka, Kontunaga dan Watupute. Kawasan Hutan Lindung Jompi memiliki luas \pm 1.927 ha atau 6% dari luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Muna. Tampak dalam tabel 1:

Tabel 1. Kawasan Hutan Kabupaten Muna

No.	Tata Guna Hutan	Luas (Ha)	Persentase terhadap Wilayah Kabupaten (%)
1.	Hutan Lindung (HL)	30.750	10,4
	- Hutan Lindung Jompi	1927	0,7
2.	Hutan Produksi (HP)	43.104	14,5
3.	Hutan Produksi Konversi (HPK)	8.953	3
4.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	1.472	0,5
5.	Hutan Suaka Alam (HSA)	9.795	3,3
Jumlah		94074	31,7

Sumber: Dinas Kehutanan Kab. Muna Tahun 2013

Gambar 1. Kondisisi Hutan Lindung Jompi



Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Tahun 2013

Dari luas Kawasan hutan lindung Jompi tersebut, ± 1.233 ha atau 64 % adalah hutan jati alam dan ± 694 ha atau 36 % adalah hutan campuran. Berdasarkan gambar 1 di atas menunjukkan Hutan Lindung Jompi telah mengalami kerusakan yang serius, ± 1.343 ha atau 70 % sudah rusak dan ± 274 ha atau 14 % terancam rusak dan ± 310 ha atau 16 % dalam keadaan aman.

Keberadaan lokasi kawasan hutan lindung di antara permukiman membawa akibat ancaman kerusakan, mengingat aktifitas penduduk permukiman sekitarnya didominasi kegiatan pertanian. Makin sempitnya lahan garapan dan rendahnya penghasilan penduduk dari sektor pertanian, serta keinginan penduduk untuk memiliki banyak lahan, sehingga mendorong

penduduk setempat melakukan kegiatan perladangan, pembalakan liar, dan perambahan hutan di kawasan hutan lindung tersebut.

Wilayah Kawasan Hutan Lindung Jompi dilalui oleh beberapa sungai yaitu: Sungai Jompi, Tula dan Labalano. Sumber mata air yang ada di dalam kawasan hutan lindung Jompi dikenal dengan nama Mata Air Jompi yang merupakan satu-satunya mata air yang merupakan sumber air bersih bagi penduduk Kota Raha yang merupakan ibu kota Kabupaten Muna yang kondisi mata airnya saat ini sudah kritis.

Kawasan hutan yang menjadi penyangganya telah rusak akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Debit airnya semakin berkurang seiring berjalannya waktu dan kerusakan hutan disekitarnya. Data PDAM Kabupaten Muna menunjukkan bahwa mata air Jompi pada kondisi yang masih baik debit airnya ± 300 liter per detik. Namun saat ini telah mengalami kerusakan yang serius sehingga debit air mata Jompi turun drastis menjadi 28 liter per detik. Hal ini berarti telah mengalami penurunan debit sungai sebesar sepuluh kali sejak dekade terakhir ini.⁵⁶

Mata Air Jompi sebagai sumber air bersih penduduk Kota Raha terancam kering. Oleh karena itu, pemerintah, swasta dan

⁵⁶ Data PDAM Kabupaten Muna Tahun 2013 dalam Skripsinya Sabri, Peranan Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Lindung Jompi untuk Pelestarian Sumber Daya Air di Kabupaten Muna, Raha: Sekolah Tinggi Pertanian Wuna, 2013, hlm.65.

masyarakat harus duduk bersama untuk menyatukan pikiran, sikap, dan tindakan dalam rangka menyelamatkan mata air Jompi dari kekeringan. Pemerintah daerah dengan kewenangannya harus menyiapkan program dan perangkat hukum yang berpihak pada pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat sekitar kawasan hutan. Pihak swasta dengan kekuatan ekonominya berpartisipasi dalam program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan secara berkelanjutan dan memiliki komitmen yang jelas untuk selalu mendukung setiap upaya pelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga masyarakat dengan segala kemampuan dan potensi yang dimilikinya harus berpikir, bersikap dan bertindak sebagai subyek pembangunan dalam rangka kelestarian hutan dan peningkatan kesejahteraan keluarganya.

b. Keadaan Sosial Sekitar Hutan Lindung Jompi

Jumlah penduduk di lima kecamatan sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi berjumlah 75.012 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 36.231 jiwa atau 48,3 persen dan perempuan berjumlah 38.781 jiwa atau 51,7 persen dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,9 % per tahun.⁵⁷

⁵⁷ Hasil analisis data 5 kecamatan Tahun 2013 dalam Skripsinya Sabri, Peranan Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Lindung Jompi untuk Pelestarian Sumber Daya Air di Kabupaten Muna, Raha: Sekolah Tinggi Pertanian Wuna, 2013, hlm.66.

Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk pada satu satuan luas wilayah tertentu. Tingkat kepadatan penduduk didasarkan pada dua kriteria yaitu tingkat kepadatan geografis dan kepadatan agraris. Kepadatan geografis adalah kepadatan penduduk terhadap luas wilayah secara keseluruhan. Kepadatan agraris adalah tingkat kepadatan penduduk terhadap luas lahan pertanian. Data tentang jumlah dan kepadatan penduduk lima kecamatan sekitar kawasan hutan lindung Jompi lebih rinci disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Luas wilayah dan kepadatan penduduk kecamatan di sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (km ²)		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
			Wilayah	Lahan Pertanian	Geografis	Agraris
1	Katobu	29.507	12.88	1.19	2.291	24.795
2	Watopute	12.323	100.12	36.99	124	333
3	Batalaiworu	13.341	22.71	10.09	587	1.322
4	Duruka	11.771	11.52	6.16	1.022	1.911
5	Kontunaga	8.070	50.88	35.85	159	225
Jumlah		75.012	198.11	90.28	379	831

Sumber: Skripsi Sabri⁵⁸

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kecamatan Katobu merupakan kecamatan terpadat, baik secara geografis maupun agraris dibanding empat kecamatan lainnya. Kondisi ini

⁵⁸ Sabri, *ibid*, hlm. 67.

menyebabkan Kecamatan Katobu tidak dimungkinkan untuk mengembangkan usaha pertanian sebagai tulang punggung sumber penghasilan masyarakat. Pengembangan sektor lain seperti sektor jasa dan perdagangan merupakan alternatif yang dapat dikembangkan sebagai mata pencaharian utama masyarakat.

Tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kecamatan Katobu, disebabkan oleh karena Kecamatan Katobu merupakan salah satu kecamatan di ibu kota kabupaten yang merupakan pusat perkantoran dan perdagangan di Kabupaten Muna. Sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan tentunya mobilitas masyarakat dan arus migrasi cukup tinggi sehingga penambahan penduduk akan tinggi pula.

Gambaran lain tentang tingkat perkembangan penduduk di sekitar kawasan hutan lindung Jompi dapat dilihat dari tingkat kepadatan Rumah Tangga (RT). Secara keseluruhan jumlah RT yang berada di sekitar kawasan hutan lindung Jompi adalah sekitar 12.814 RT dengan tingkat kepadatan RT rata-rata 5 jiwa/RT. Data jumlah RT dan tingkat kepadatan RT dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Rumah Tangga (RT) dan tingkat kepadatan RT di kecamatan sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah RT	Tingkat Kepadatan Jiwa/RT
1.	Katobu	29.507	7.538	4
2.	Watopute	12.323	2.968	4
3.	Batalaiworu	13.341	2.926	5
4.	Duruka	11.771	2.766	4
5.	Kontunaga	8.070	1.945	4
Jumlah		75.012	18.143	4

Sumber: Skripsi Sabri⁵⁹

Tingkat kepadatan RT di sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi masih dalam kondisi ideal yaitu rata-rata 4 jiwa per RT atau tiap RT terdiri dari 2 anak dan ini tergolong sebagai keluarga kecil bahagia. Kondisi ini menggambarkan bahwa program Keluarga Berencana (KB) sekitar kawasan hutan lindung Jompi berhasil.

c. Keadaan Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Kabupaten Muna saat ini memiliki 156 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempekerjakan sebanyak 72 orang Polisi Kehutanan (Polhut) Honorer untuk menunjang produktifitas dari kerja-kerja dinas kehutanan. Untuk itu ditampilkan tabel-tabel berikut:

⁵⁹ Sabri, *ibid*, hlm. 68.

Tabel 4. Sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Muna menurut status kepegawaiannya

No.	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	156
2.	Polisi Kehutanan (Polhut) Honorer	72
Jumlah		228

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Muna

Tabel 5. Sumber daya manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berdasarkan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil atau Golongan Kepegawaiannya

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1.	IV/c	1
2.	IV/b	3
3.	IV/a	5
4.	III/d	18
5.	III/c	31
6.	III/b	23
7.	III/a	35
8.	II/d	5
9.	II/c	7
10.	II/b	22
11.	II/a	6
Total		156

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Muna

Tabel 6. Sumber daya Manusia pada Dinas Kehutanan Kabupaten Muna berdasarkan tingkat pendidikan dan profesinya

No.	Tingkat Pendidikan	Profesi	Jumlah (Orang)
1.	Master (Strata 2)	Bukan Kehutanan	11
2.	Sarjana (Strata 1)	Kehutanan	50
3.	Sarjana (Strata 1)	Bukan Kehutanan	27
4.	Sarjana Muda (Diploma)	Kehutanan	2
5.	SLTA ke bawah	Bukan Kehutanan	138
Total			228

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Muna

Melihat tabel 6 berdasarkan tingkat pendidikan dan profesi di atas, hanya ada 24 % yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang kehutanan. Kepala Dinas dan Semua Kepala Bidang memiliki latar belakang ilmu bukan kehutanan.

Data jabatan dan penjabaran tugas pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Muna sebagai mana yang ada dalam Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, diuraikan pada tabel 7 berikut:

Tabel 7. Data Jabatan dan tugas pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Muna

No	Jabatan	Tugas Pokok
1.	Kepala Dinas	Membantu bupati dalam memimpin, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kehutanan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2.	Sekretaris	Membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi, mengendalikan program dan kegiatan pada semua satuan organisasi lingkup Dinas, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan inventarisasi Aset Dinas.
4.	Sub Bagian Keuangan	Melaksanakan pengelolaan Administrasi keuangan yang meliputi penyusunan pembukuan, verifikasi, pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5.	Sub Bagian Perencanaan	Menyiapkan bahan penyusunan dan penetapan rencana kegiatan tahunan/alokasi anggaran tahunan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Kehutanan, Pengaturan Tarif Pelayanan Umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6.	Bidang Bina Hutan	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan dibidang Bina Hutan meliputi Perbenihan, Pembibitan Tanaman Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7.	Seksi Perbenihan dan Pembibitan Tanaman Hutan	Membantu Kepala Bidang Bina Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program, dan mengevaluasi kegiatan dibidang Perbenihan dan pembibitan tanaman hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
8.	Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Membantu Kepala Bidang Bina Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program, dan mengevaluasi kegiatan dibidang rehabilitasi hutan dan lahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
9.	Seksi Aneka Usaha Kehutanan	Membantu Kepala Bidang Bina Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program, dan mengevaluasi kegiatan dibidang aneka usaha kehutanan serta

		melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
10.	Bidang Perencanaan Hutan	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan dibidang perencanaan hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
11.	Seksi Rencana Karya dan Pengusahaan Hutan	Membantu Kepala Bidang Perencanaan Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan dibidang rencana karya dan pengusahaan hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
12.	Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan	Membantu Kepala Bidang Perencanaan Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan inventarisasi dan perpetaan hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
13.	Seksi Pengukuhan dan Penatagunaan	Membantu Kepala Bidang Perencanaan Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan dibidang pengukuhan dan penatagunaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
14.	Bidang Bina Produksi	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan dibidang bina produksi meliputi penataan tebangan dan pengawasan eksploitasi hutan, pengukuran dan tanda legalitas hasil hutan dan pengembangan hutan tanaman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
15.	Seksi Eksploitasi Hutan	Membantu Kepala Bidang Bina Produksi dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan eksploitasi hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
16.	Seksi Pengukuran dan Tanda Legalitas Hasil Hutan	Membantu Kepala Bidang Bina Produksi dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan dibidang pengukuran dan tanda legalitas hasil hutan serta melaksanakan tugas

		lain yang diberikan oleh pimpinan;
17.	Seksi Pengembangan Hutan Tanaman	Membantu Kepala Bidang Bina Produksi dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan dibidang pengembangan hutan tanaman serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
18.	Bidang Perlindungan Hutan	Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas perumusan kebijakan dibidang perlindungan hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
19.	Seksi Pengamanan Hutan	Membantu Kepala Bidang pengamana Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan dibidang pengamanan hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
20.	Seksi Hukum dan Perundang-undangan	Membantu Kepala Bidang pengamana Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan dibidang hukum dan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
21.	Seksi Tenaga dan Sarana	Membantu Kepala Bidang pengamana Hutan dalam menyiapkan bahan pedoman perumusan kebijakan teknis, menyusun rencana, melaksanakan program dan mengevaluasi kegiatan dibidang tenaga dan sarana serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
22.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	Melaksanakan sebagian tugas Dins kehutanan dibidang Kesatuan Pemangkuan hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
23.	Sub Bagian Tata Usaha	Membantu Kepala UPTD dibidang Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, dan Surat Menyurat serta Pencatatan dan Pelaporan;
24.	Kelompok Jabatan Fungsional	Melaksanakan sebagian tugas dinas dan sebagian tugas UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Muna

Dinas kehutanan selaku dinas terkait dengan pengelolaan hutan mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap kawasan hutan. Selain menjalankan fungsi mengontrol pengelolaan hutan, Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kehutanan juga berperan sebagai penyidik terhadap kejahatan kehutanan. Penyidik dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana tersebut dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan:

- Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri.
- Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri.
- Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.
- Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada

Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain bahwa:

- 1) Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah:
 - sebagai koordinator; dan
 - sebagai pengawas proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
- 2) Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilaian dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri

terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan legalitas.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku kejahatan di bidang kehutanan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Kehutanan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku kejahatan *illegal logging*.

Pada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus”.

Adapun wewenang Polisi Kehutanan (kepolisian khusus) sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagai berikut:

- a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang;
- f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Tugas dari polisi hutan yang merupakan ujung tombak pengawasan hutan yang sangat berat mulai dari melakukan patroli di seluruh kawasan hutan untuk menjaga hutan dari segala bentuk kegiatan yang berlangsung di kawasan hutan. Menjaga hutan, hasil hutan, flora dan fauna yang ada di dalam

hutan. Melakukan penindakan terhadap kejahatan yang terjadi di kawasan hutan. Merupakan salah satu tugas dari sekian banyak tugas yang diemban oleh polisi hutan.

Namun di Kabupaten Muna, sejak tahun 2009 sampai 2013 tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada tahun 2014 ini Dinas Kehutanan Kabupaten Muna memiliki PPNS hanya 2 orang. Hal inilah yang menjadikannya salah satu kekurangan produktifitas kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.

2. Data Kasus Kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Muna

Kabupaten Muna dengan hutan yang luas tentu tidak terlepas dari kejahatan terhadap hutan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk mengetahui perkembangan kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna, khususnya pada Hutan Lindung Jompi, penulis melakukan penelitian di instansi terkait yakni Polres Muna, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, dan masyarakat setempat (masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi) untuk mendapatkan data yang terkait dengan judul penelitian penulis.

Dari data yang ada menunjukkan jumlah kasus yang terjadi selama rentan waktu 4 tahun terakhir adalah sebanyak 76 kasus. Kasus terbanyak terjadi pada tahun 2011 dan 2013, yang masing-masing berjumlah 21 kasus. Sedangkan untuk tahun 2010 ada

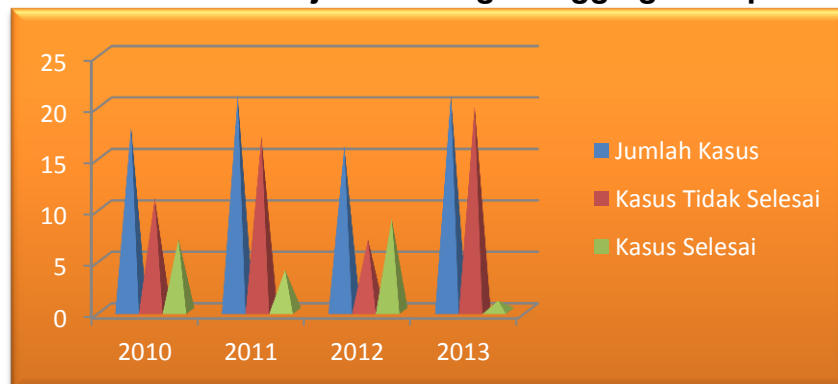
18 kasus dan 2012 berjumlah 16 kasus. Hal ini menunjukkan indeks kasus naik turun tiap tahunnya, sebagaimana nampak dalam tabel 8. dan gambar 2. berikut:

Tabel 8. Kasus Kejahatan *Illegal Logging* Kabupaten Muna

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Kasus Tidak Selesai
1.	2010	18	7	11
2.	2011	21	4	17
3.	2012	16	9	7
4.	2013	21	1	20
Total		76	21	55

Sumber: Data Kantor Kepolisian Resort Muna

Gambar 2. Kasus Kejahatan *Illegal Logging* Kabupaten Muna



Sumber: Data Kantor Kepolisian Resort Muna

Dari data tersebut di atas mengindikasikan kepada dua hal, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan secara umum dan Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian Hutan Lindung Jompi secara khusus;

2. Upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah setempat belum berhasil menyelamatkan kawasan hutan Kabupaten Muna secara umum, dan khususnya Hutan lindung Jompi;

Namun dari total kasus tersebut hanya ada 28% atau 21 kasus yang terselesaikan dan 72% atau 55 kasus yang tidak terselesaikan. Sedangkan khusus untuk kasus terkait dengan kawasan Hutan Lindung Jompi tidak ada yang diselesaikan. Menurut AIPTU Muh. Nexon Ode Byo (Kepala Unit Reskrim Polres Muna, wawancara tanggal 3 Februari 2014) menyatakan bahwa:

“Kendala utama penanganan kasus kejahatan *illegal logging* adalah tidak diketahuinya atau tidak teridentifikasinya pelaku. Lagi-lagi hanya temuan kayu di dalam hutan tanpa ada yang ketahui siapa pelakunya, dan yang membuat hal ini rumit adalah kurangnya saksi. Selain itu, pelaku-pelaku itu cerdik juga, beraksi dengan melihat kelemahan-kelemahan petugas. Terlepas dari itu, tidak hanya wilayah hutan lindung jompi saja yang polisi jaga, dan bukan hanya kasus terkait kejahatan *illegal logging* yang pihak kepolisian tangani, masih banyak kasus-kasus yang lain.”

Lanjut La Ode Sanda, STP (Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, dalam wawancara tanggal 10 Februari 2014) Menjelaskan bahwa:

“ dalam menindak lanjuti pelaku, pihak kehutanan memiliki kelemahan. Hal ini dikarenakan dinas kehutanan tidak memiliki PPNS sejak tahun 2009 hingga 2013.”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penanganan kasus *illegal logging* terdapat 3 kendala yang dialami pihak yang berwajib, yaitu:

1. Pelaku tidak diketahui;

2. Kurangnya saksi; dan
3. Kurangnya sumber daya penegak hukum.

Terlepas dari kendala yang dihadapi, pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab telah melakukan segala daya upaya dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging* dan terus membuat upaya-upaya baru demi terjaganya hutan di Kabupaten Muna dan khususnya Hutan Lindung Jompi.

3. Faktor Penyebab Kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Muna

Hutan sebagai sumber daya alam yang memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, pengelola hutan, dan *stakeholders* serta lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, pengelolaan hutan yang baik juga harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian hutan, seperti aspek ekologi, produksi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa informan, menarik pada suatu kesimpulan bahwa hingga saat ini, pembalakan liar (*illegal logging*) masih menjadi masalah pelik yang sulit untuk diurai. Pada umumnya, kasus *illegal logging* diikuti dengan perambahan kawasan hutan untuk ladang dan kebun. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan.

Karena seriusnya *illegal logging* sebagai suatu kejahatan luar biasa, yang dampaknya langsung dari hari ke hari semakin meningkat dengan tingkat kualitas dan modus operandi yang kian kompleks. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Resort Pemangkuhan Hutan (KRPH) Raha La Ode Milu, S.Hut (tanggal 7 Februari 2014), sesuatu hal yang mustahil jika praktik kejahatan *illegal logging* dapat ditanggulangi tanpa menggunakan pendekatan terpadu. Pada kenyataannya, tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk menyeret aktor utama *illegal logging*.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna khususnya Hutan Lindung Jompi sebagai berikut:

1. Kepentingan Ekonomi

Kayu yang memiliki banyak kegunaan, yakni kayu digunakan sebagai bahan bangunan, alat-alat rumah tangga, pembuatan perahu, dan lain-lain. Hal inilah sehingga dikatakan bahwa kayu sangat dibutuhkan oleh umat manusia. Namun dalam kegunaannya masyarakat banyak menginginkan dari sumber kayu yang berkualitas antara lain kayu berasal dari pohon Jati. Adapun pohon Jati yang dapat menghasilkan kayu berkualitas tinggi yaitu pohon jati yang berusia di atas 30 tahun. Sebab untuk meraih keuntungan optimal, jatu baru bisa dipanen

pada umur di atas 30 tahun. Makin tua umur tanaman, akan semakin tinggi kualitas kayunya.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu informan Sudirman, SP. sebagai Kepala Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna (tanggal 10 Februari 2014) menyimpulkan bahwa salah satu faktor terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna, khususnya dalam wilayah Hutan Lindung Jompi adalah kayu yang dihasilkan dalam Hutan Lindung Jompi memiliki kualitas tinggi.

Hal tersebut dipertegas lagi hasil wawancara penulis dengan Safrun sebagai pelaku kejahatan *illegal logging* (tanggal 18 Januari 2014) dan beberapa pelaku kejahatan *illegal logging* lainnya, bahwasanya kayu berkualitas tinggi lebih banyak menghasilkan keuntungan. Hal inilah yang menjadi salah satu motif dari para pelaku melakukan kejahatan *illegal logging* pada Kawasan Hutan Lindung Jompi.

Penggunaan mesin-mesin canggih, baik dalam penebangan, pengangkutan, pengerajinan, maupun dalam pemotongan dan pengolahan lebih lanjut. Sudah seharusnya usaha komersialisasi kayu terutama kayu hutan dilaksanakan

⁶⁰ Foragri, *Peluang Budi Daya Jati*. Posted on 09/04/2012, Website: www.foragri.com. Didownload tanggal 04/03/2014.

dengan sangat hati-hati dan selalu diimbangi dengan usaha penanaman kembali pohon yang telah ditebang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasat Reskrim Kabupaten Muna Bapak AIPTU Nexon (tanggal 3 Februari 2014), umumnya Pelaku kejahatan *illegal logging* adalah masyarakat setempat yang tidak tahu dan menjadikan kejahatan *illegal logging* sebagai sumber penghasilan utama. Kejahatan *illegal logging* kemudian dianggap wajar oleh masyarakat setempat sebagai aktivitas ekonomi masyarakat lokal.

Hal tersebut di atas selaras dengan apa yang dikatakan beberapa masyarakat sekitar Hitung Lindung Jompi yang sempat diskusi dengan penulis, bahwasanya kegiatan penjualan kayu-kayu tanpa dokumen resmi sudah menjadi hal biasa yang mereka lihat. Ada distributor yang menadah dan membeli hasil penebangan yang dilakukan masyarakat setempat. Kelompok ini adalah orang yang memiliki modal pribadi yang cukup untuk berbisnis kayu dengan para agen atau cukong, pemilik modal besar yang memasarkan kayu hasil pembalakan liar tersebut ke luar daerah Kabupaten Muna. Ada juga distributor yang memang telah direkrut dan dipercayakan oleh cukong untuk mengurus pembelian dan pengangkutan kayu dari lokasi tempat pembalakan ke tempat penampungan cukong tersebut.

Sehingga modal yang dimiliki oleh distributor ini berasal dari cukong itu sendiri.

Ada pengumpul kayu utama yang memiliki modal besar (cukong) baik yang berasal dalam maupun luar daerah Kabupaten Muna. Merekalah yang membeli hasil penebangan hutan dari distributor tadi. Dalam menjalankan usahanya, para cukong ini biasanya tidak dibekali surat perizinan usaha yang jelas. Walaupun ada, izin usaha itu disalah gunakan. Mereka inilah yang kemudian memasarkan kayu hasil pembalakan tersebut ke dalam maupun ke luar daerah Kabupaten Muna dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pembelian sebelumnya. Hal ini tentunya sangatlah merugikan bagi pengusaha legal, karena berdampak pada langka dan mahal nya memperoleh bahan baku kayu.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sofyan Abubakar, S.Hut. selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Tanda Legalitas Hasil Hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna (tanggal 11 Februari 2014), menjelaskan bahwa:

“Sesuatu yang tidak bisa dipungkiri sebagian dari pelaku kejahatan *illegal logging* dilakukan oleh orang-orang yang memiliki taraf hidup di bawah rata-rata, namun itu bukan sebagai faktor utama, karena yang mendominasi para pelaku kejahatan *illegal logging* saat ini adalah orang-orang yang telah memiliki taraf hidup di atas rata-rata”.

Sebagai bentuk ketegasan dari pernyataan di atas, penulis menguraikan hasil wawancara penulis dengan

beberapa pelaku kejahatan *illegal logging* yang memiliki pekerjaan tetap yaitu Syafarudin dan La Edi, bekerja sebagai PNS Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, bahwasanya melakukan kejahatan *illegal logging* hanya untuk menambah-nambah penghasilan agar lebih banyak lagi. Selain itu melakukan kejahatan tersebut dengan memperhatikan peluang dan kesempatan agar dapat terlepas dari jeratan hukum.

Sementara bagi masyarakat kecil yang hidup di sekitar hutan, menjadi yang pertama akan terkena dampaknya akibat kejahatan *illegal logging*. Meskipun sebagian mereka ikut terlibat dalam kejahatan tersebut. Namun hanya menikmati keuntungan kecil yang sifatnya sementara, dan pada akhirnya ketika hutan habis dan lingkungannya semakin rusak, mereka pun akan terancam kehidupan sosial ekonominya. Mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap dampak buruk yang ditimbulkan oleh proses kejahatan *illegal logging*.

Praktek kejahatan *illegal logging* yang telah merongrong kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi dunia merupakan bentuk kejahatan pidana yang harus dituntaskan.

2. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan Hutan

Para aparat penegakan hukum yang terkait belum berhasil menggunakan kewenangannya dalam mengatasi kejahatan *illegal logging*. Hal ini didasarkan pada banyaknya

jumlah kasus yang tidak terselesaikan dan besarnya jumlah kerusakan hutan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kabupaten Muna Bapak La Ode Sanda, STP.(tanggal 10 Februari 2014), Kasus kejahatan *illegal logging* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 di Hutan Lindung Jompi banyak yang tidak ditindak lanjuti, karena beberapa hal: pertama, tidak adanya PPNS di Dinas Kabupaten Muna. Kedua, kasus-kasus yang sempat dibuatkan laporan kejadiannya dilimpahkan semua kepada pihak kepolisian. Hal ini tetap dimonitoring oleh pihak dinas kehutanan, tapi semua kasusnya tidak ada yang sampai masuk pengadilan.

Pengawasan hutan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan *illegal logging*. Lemahnya pengawasan hutan dapat memicu kejahatan *illegal logging* terus meningkat. Sehingga pelaku kejahatan *illegal logging* merasa tidak akan ada ancaman karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal inilah yang mesti diperhatikan sebagai langkah dalam mengatasi kejahatan *illegal logging*.

Menurut La Edi pelaku kejahatan *illegal logging* yang pekerjaannya sebagai PNS (wawancara tanggal 26 Januari 2014) menyatakan bahwa:

“Pengangkutan kayu tanpa dokumen-dokumen yang lengkap dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan yang lebih banyak dan prosesnya cepat, jika dibandingkan harus mengurus dokumen-dokumen secara lengkap terlebih dahulu”.

Selanjutnya Safar, pelaku kejahatan *illegal logging* yang pekerjaannya sebagai sopir (wawancara tanggal 24 Januari 2014) mengatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan pengangkutan kayu tanpa surat-surat resmi dilakukan dengan melihat kondisi-kondisi di lapangan yaitu bagaimana kondisi petugas, apa mereka melakukan patroli atau tidak. Biasanya ada orang yang kami disuruh untuk mengecek petugas.”

Lebih lanjut La Abu, pelaku kejahatan *illegal logging* yang pekerjaannya sebagai pengusaha kayu (wawancara tanggal 24 Januari 2014) menjelaskan bahwa:

“Dalam pembelian kayu dan pengangkutan kayu saya biasanya memanggil seorang polisi untuk mengawal kayu-kayu yang sudah dibeli untuk diangkut sampai ditujuan, ini sering dilakukan karena biasanya bisa diatur kalau bertemu petugas lain di perjalanan.”

La Abu juga mengatakan bahwa:

“hingga masuk penjara itu karena kesialan saya, selain itu hukumannya juga yang diberikan hanya selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 300.000,-“

Berdasarkan data wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan kejahatan *illegal logging* untuk memperoleh penghasilan tambahan, namun terlepas dari hal itu para pelaku merasa bebas melakukan kejahatan tersebut. Bebas dalam artian kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum dan

sanksi yang diberikan tidak membuat jera serta ada oknum dari aparat penegak hukum yang mengawal dalam kejahatan *illegal logging*.

Hal tersebut di atas dipertegas lagi berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa Polisis Kehutanan yang merupakan ujung tombak pengawasan hutan dilapangan. Bahwasanya pengawasan hanya sebagai formalitas belaka, dikarenakan adanya oknum-oknum tertentu yang memiliki andil dalam kejahatan *illegal logging*.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Wa Ana sebagai pelaku kejahatan *illegal logging* (tanggal 19 Januari 2014) dan beberapa pelaku kejahatan *illegal logging* lainnya serta beberapa informan (bukan sebagai pelaku kejahatan *illegal logging*), menyimpulkan bahwa adanya oknum-oknum dalam instansi atau lembaga yang seharusnya mencegah terjadinya kejahatan *illegal logging* dan menindak pelaku-pelaku kejahatan tersebut, namun oknum tersebutlah yang memiliki andil besar sehingga dapat terjadinya kejahatan *illegal logging*.

Oknum pegawai pemerintah (khususnya dari instansi kehutanan) yang melakukan KKN, memanipulasi dokumen, dan tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana mestinya. Oknum penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, TNI) yang bisa dibeli dengan uang sehingga para aktor pelaku penebangan liar,

khususnya para cukong dan penadah kayu curian dapat terus lolos dengan mudah dari hukuman. Oknum TNI dan POLRI turut terlibat, termasuk ada yang mengawal pengangkutan kayu curian. Seperti itulah beberapa bentuk-bentuk andil dari oknum-oknum tersebut.

Ada yang ditangani dan ada yang tidak ditangani, ada yang tuntas dan ada yang tidak tuntas. Kalau bicara hutan langsung bicara uang. Seperti itulah yang terjadi melihat keadaan di Kabupaten Muna. Adanya kepentingan oknum-oknum tertentu lah yang membuat maraknya kasus kejahatan *illegal logging*. Hal inilah yang membuat kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna, khususnya Kawasan Hutan Lindung Jompi rumit diatasi.

B. Upaya Penanggulangan kejahatan *Illegal Logging* di Kabupaten Muna

Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan *illegal logging* yang telah dibahas sebelumnya, untuk penanggulangan kejahatan *illegal logging* dapat dilakukan beberapa upaya pencegahan dan rehabilitasi kawasan hutan yang telah rusak. Mengingat kawasan hutan lindung jompi memiliki mata air yang menjadi sumber air bersih bagi masyarakat setempat (penduduk kota Raha). Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeringan dan juga dampak lainnya seperti banjir dan tanah longsor, serta hilangnya keanekaragaman

hayati dan jasa lingkungan hutan, baik sebagai penyerap karbon, fungsi tata air, maupun jasa lingkungan hutan lainnya.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh untuk mencegah kejahatan *illegal logging* yang disebabkan pada faktor lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hutan yaitu para aparat yang berwenang harus menegakan hukum dan melakukan pengawasan hutan secara total dan terpadu. Dalam hal menyikapi pelaku kejahatan *illegal logging*, seluruh aparat yang terkait dalam hal ini instansi kehutanan, kepolisian, TNI, kejaksaan dan pengadilan bersama masyarakat harus bersinergi.

Adapun upaya-upaya dalam rangka mengurangi dan mencegah terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna dan khususnya pada wilayah Hutan Lindung Jompi, yang saat ini telah dilakukan adalah:

1. Upaya Pre-emptif

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai/norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Dengan demikian, meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AIPTU Nexon Ode Byo selaku kepala unit reskrim Polres Muna (tanggal 3 Februari

2014), untuk mengatasi kejahatan *illegal logging*, pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang pemahaman hukum, risiko dari kerusakan hutan, dan pemanfaatan hutan secara prosedural kepada masyarakat dan internal penegak hukum. Selain penyuluhan, dilakukan juga pemasangan pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan pentingnya kelestarian Hutan Lindung Jompi di Kabupaten Muna.

Selain dari pihak kepolisian, upaya pencegahan berupa penyuluhan hutan juga dilakukan oleh pihak dari dinas kehutanan. Berdasarkan hasil wawancara dengan La Ifaruddin BE, S.IP., MM. selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Muna (tanggal 12 februari 2014), untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pihak dari dinas kehutanan melakukan penyuluhan tentang pentingnya melestarikan dan menjaga hutan.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian Bripka Nasrun (anggota Polres Muna, tanggal 4 Februari 2013), secara preventif yang telah dilakukan adalah tetap siaga, turut aktif dan tanggap dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan *illegal logging*, dengan bekerja sama dan meningkatkan

koordinasi dengan personil Polisi Hutan yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan dan laut, melakukan pengamanan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan, serta melakukan penjagaan di titik rawan peredaran hasil hutan antara lain: industri pengolahan kayu, pelabuhan penyebrangan dan lain-lain.

3. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan *illegal logging* yaitu menindak para pelaku kejahatan *illegal logging* sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, dengan mengamankan terlebih dulu yang diduga kuat sebagai pelaku kejahatan *illegal logging* dan selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap setiap kasus kejahatan *illegal logging*. Setiap kasus kejahatan *illegal logging* yang tuntas dalam penyidikan dilimpahkan kekejaksaan dan kemudian untuk diadili kepengadilan dengan sanksi seberat-beratnya. Sehingga para pelaku kejahatan *illegal logging* tidak lagi mengulangi perbuatannya, karena dapat timbul efek jera dengan sanksi yang diberikan.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan secara maksimal yaitu sebagai berikut:

- a. Memberdayakan masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi, dengan memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar Hutan Lindung

Jompi untuk mengambil keuntungan dari kawasan hutan tersebut, dengan mengolah kawasan hutan yang telah rusak untuk menanam tanaman semusim.

- b. Dalam hal pengambilan manfaat dari kawasan hutan, masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi harus memperhatikan hutan tersebut agar tidak mengalami kerusakan secara keseluruhan, yaitu dengan cara reboisasi.
- c. Kegiatan reboisasi harus dilakukan oleh semua pihak, entah itu Pemerintah Daerah Kabupaten Muna, Dinas Kehutanan Kabupaten Muna, kepolisian (Polres Muna), tentara (Kodim 1416 Muna), dan masyarakat setempat, serta pihak-pihak lainnya yang terkait. Dengan catatan bahwa pemerintahlah yang menyiapkannya bibit pohon.

Maksud dan tujuan dilakukannya hal tersebut di atas adalah menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan terhadap Hutan Lindung Jompi oleh masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi untuk menjaga dan melestarikan hutan tersebut yang sebagai penopang hidup bagi orang banyak pada umumnya dan khususnya masyarakat sekitar hutan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada La Ifaruddin BE, S.IP., MM. selaku Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Muna (tanggal 12 februari 2014), diutarakan hal-hal sebagai berikut:

“Hasil investigasi di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Kab. Muna bahwa terdapat kelompok masyarakat yang berjumlah \pm 400 orang berencana akan melakukan perambahan di Hutan Lindung Jompi, bahkan telah melakukan pemasangan patok yang merupakan kaplingan masing-masing perambah. Setelah dilakukan dialog kepada mereka, kelompok masyarakat menyampaikan bahwa keinginan masyarakat untuk melakukan aktifitas perambahan/ pengaplingan Kawasan Hutan Lindung Jompi disebabkan oleh maraknya aktifitas perambahan/pengaplingan dan penebangan liar oleh kelompok masyarakat lainnya. Kelompok yang berencana tersebut bersedia menghentikan aktifitas jika sebagian besar kawasan Hutan Lindung Jompi yang telah rusak dikembalikan fungsinya sebagaimana kawasan hutan lindung.”

Lebih lanjut La Ifaruddin BE, S.IP., MM. menyatakan bahwa:

“Untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam menyelamatkan Kawasan Hutan Lindung Jompi dari perambahan/pengaplingan sebagai hutan penyangga sumber mata air, maka disarankan kawasan hutan yang telah rusak dikembalikan fungsinya sebagaimana hutan lindung.”

Segenap pihak harus melaksanakan tugasnya dengan secara maksimal untuk penyelamatan hutan di Kabupaten Muna dan khususnya Hutan Lindung Jompi demi kelestarian hutan dan pemanfaatan hasil hutan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Muna pada umumnya dan masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi pada khususnya, dan tidak hanya untuk segelintir orang yang tidak bertanggung jawab.

La Ode Sanda, STP selaku kepala bidang perlindungan hutan Dinas Kehutanan Kabupaten Muna (dalam wawancara tanggal 10 Februari 2014) menjelaskan bahwa:

“Dalam penanganan Kawasan Hutan Lindung Jompi agar dilakukan dengan pendekatan sosial kemasyarakatan dan semaksimal mungkin dihindari terjadinya konflik.”

Hal tersebut di atas mesti diperhatikan secara total, agar dapat mencapai visi Dinas Kehutanan Kabupaten Muna yaitu terwujudnya kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan dalam memperkuat perekonomian rakyat dan mendukung perekonomian daerah yang sehat bagi kesejahteraan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna dan khususnya pada kawasan Hutan Lindung Jompi yaitu:
 - a. Kepentingan ekonomi,
 - b. Lemahnya penegakan hukum dan pengawasan hutan.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan terjadinya kejahatan *illegal logging* di Kabupaten Muna dan khususnya pada kawasan Hutan Lindung Jompi yaitu:
 - a. Upaya Pre-emptif yakni:
 - 1) Mengadakan penyuluhan atau sosialisasi tentang pemahaman hukum, risiko dari kerusakan hutan, dan pemanfaatan hutan secara prosedural kepada masyarakat dan internal penegak hukum. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan oknum-oknum dalam internal penegak hukum akan pentingnya memahami hukum, melestarikan hutan, dan memanfaatkan hutan secara prosedural.

2) Memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho, dan menghimbau lewat media cetak atau media elektronik tentang pentingnya kelestarian Hutan Lindung Jompi di Kabupaten Muna.

b. Upaya Preventif yakni:

Tetap siaga, turut aktif, dan tanggap dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan *illegal logging*, dengan bekerja sama dan meningkatkan koordinasi dengan personil Polisi Hutan yang melakukan patroli rutin di kawasan hutan dan laut, melakukan pengamanan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan, serta melakukan penjagaan titik rawan peredaran hasil hutan antara lain: industri pengolahan kayu, pelabuhan penyebrangan dan lain-lain.

c. Upaya Represif yakni:

Mengamankan terlebih dulu yang diduga kuat sebagai pelaku kejahatan *illegal logging* dan selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap setiap kasus kejahatan *illegal logging*. Setiap kasus kejahatan *illegal logging* yang tuntas dalam penyidikan dilimpahkan kekejaksaan dan kemudian untuk diadili kepengadilan dengan sanksi seberat-beratnya.

Selain hal tersebut di atas, hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan secara maksimal yaitu memberdayakan masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi dan melakukan reboisasi.

B. Saran

Sebagai pelengkap tulisan ini, beberapa pemikiran penulis tuangkan dalam bentuk saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum sudah seharusnya meningkatkan kinerjanya dalam hal penyidikan setiap kasus kejahatan *illegal logging* agar dapat diproses secara profesional dan para pelaku tidak terhindar dari jeratan hukum yang ada.
2. Perekrutan anggota sebagai aparat penegak hukum sudah semestinya yang memiliki integritas dan mampu mengemban tanggung jawab yang telah melekat pada dirinya.
3. Pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah daerah (bupati), camat, aparat desa, instansi kehutanan, kepolisian, militer, kejaksaan, pengadilan, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri harus memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya kelestarian hutan dan pemanfaatan hutan secara prosedural serta menghindari risiko kerusakan hutan, sehingga kejahatan *illegal logging* tidak lahir.
4. Instansi khusus dalam hal ini dinas kehutanan mesti melakukan pendekatan persuasif terhadap masyarakat untuk memahami hukum dalam bidang kehutanan, pentingnya kelestarian hutan, dan pemanfaatan hutan secara prosedural, serta risiko kerusakan hutan, sehingga kejahatan *illegal logging* tidak lahir.

5. Masyarakat sekitar Hutan Lindung Jompi harus benar-benar memahami manfaat hutan dan dampak dari kerusakan hutan, agar dapat mengetahui hak mereka yaitu mendapat manfaat dari Hutan Lindung Jompi dan kewajiban mereka yaitu menjaga kelestarian Hutan Lindung Jompi bersama pemerintah dengan mengadakan reboisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Cetakan Ke-1. Pustaka Refleksi: Makassar.
- Anwar, Yesmi dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Refika Aditama: Bandung.
- B.A., Garner. 1999. *Blak's Law Dictionary*. Edisi Ke-7. West Group: Dallas Texas.
- D., Rahmi Hidayati, dkk. 2006. *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyeludupan Kayu: Melalui Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Wana Aksara: Tangerang.
- Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Edisi Ke-3. Global Forest Watch: Bogor.
- H.S., Salim. 2013. *Dasar-Dasar Kehutanan*. Cetakan Ke-5. Sinar Grafika: Jakarta.
- Muljono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Cetakan Ke-1. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.
- Nurdjana, IGM, dkk. 2008. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Cetakan Ke-3. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- P., Salim. *the Contemporary English Indonesian Dictionary*. Edisi ke-6, Modern English Press: Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Cetakan Ke-12. Rajawali Pers: Jakarta..
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politea: Bogor.
- Sukardi. 2005. *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*. Cetakan Ke-1. Universitas Atma Jaya: Yogyakarta.
- Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Cetakan Ke-2. Sinar Grafika: Jakarta Timur.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika: Jakarta.

Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*. Refika Aditama: Jakarta.

Weda, Made Dharma. 1996. *Kriminologi*. Raja Grafindo: Jakarta.

Zein, Alam Setia. 1996. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Rineka Cipta: Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (LN 1976-26).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Inpres Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil Hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser Taman Nasional Tanjung Puting.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Peraturan Bupati Muna Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Muna.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

SKRIPSI

Sabri, 2013. *Peranan Masyarakat dalam Pelestarian Hutan Lindung Jompi untuk Pelestarian Sumber Daya Air di Kabupaten Muna*, Jurusan Kehutanan Sekolah Tinggi Pertanian Wuna: Raha.

WEBPAGE INTERNET

Down to Earth, No. 53/54, Agustus 2002, *Nota Kesepahaman (MOU) Indonesia-Inggris mengenai Penebangan Kayu Liar*, dari Webpage <http://www.dte.gn.apc.Org/53iMo.htm>. dalam bukunya IGM. Nurdjana dkk. 2008. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Cetakan Ke-3. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

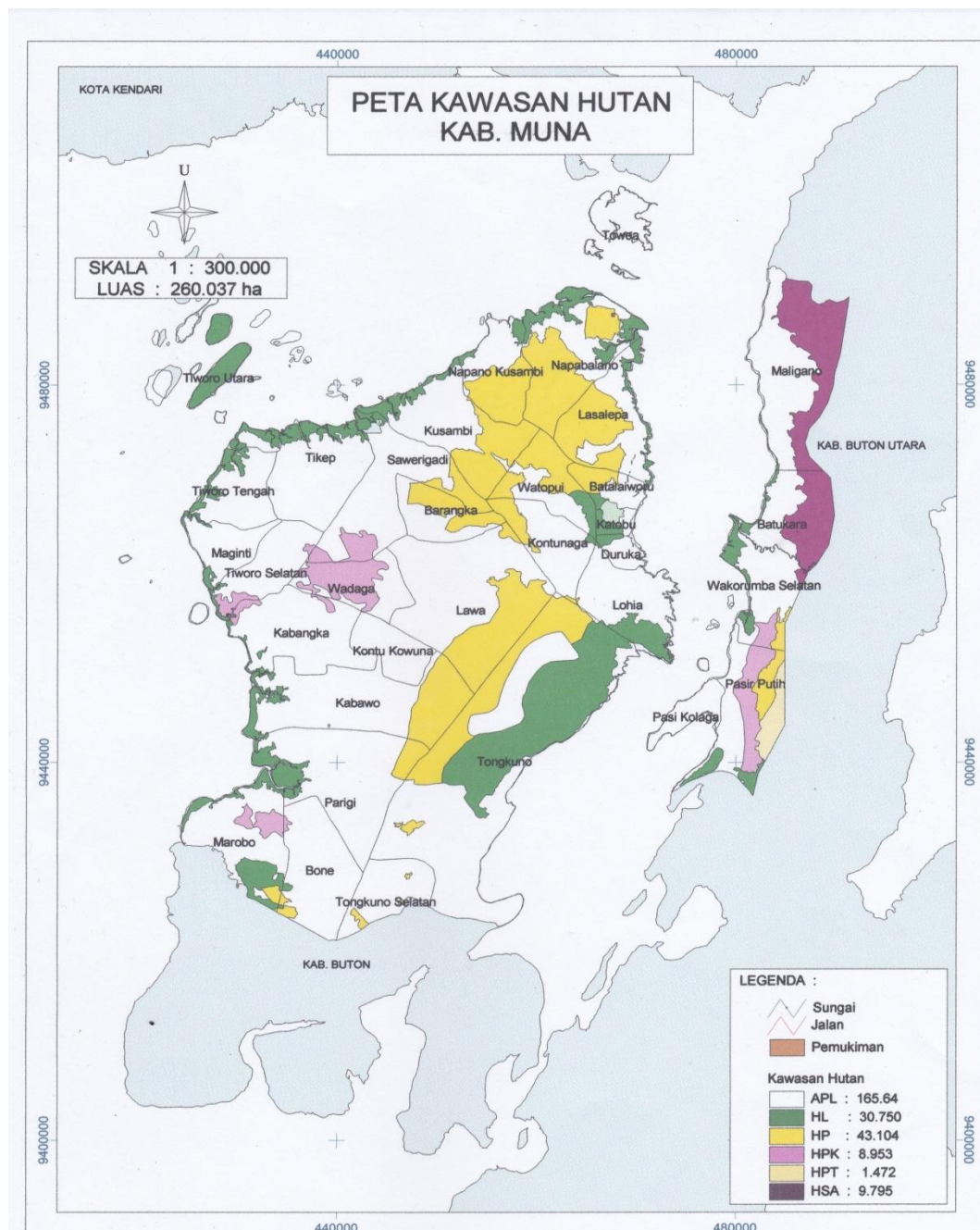
Foragri, *Peluang Budi Daya Jati*. Posted on 9 April 2012, Website: www.foragri.com. Didownload tanggal 4 Maret 2014.

Ginting L., *Korupsi adalah Inti dari Illegal Logging*, dari webpage (www.APIndonesia.com), hlm 1: (diakses tanggal 11 November 2003) dalam bukunya IGM. Nurdjana dkk. 2008. *Korupsi & Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi*. Cetakan Ke-3. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

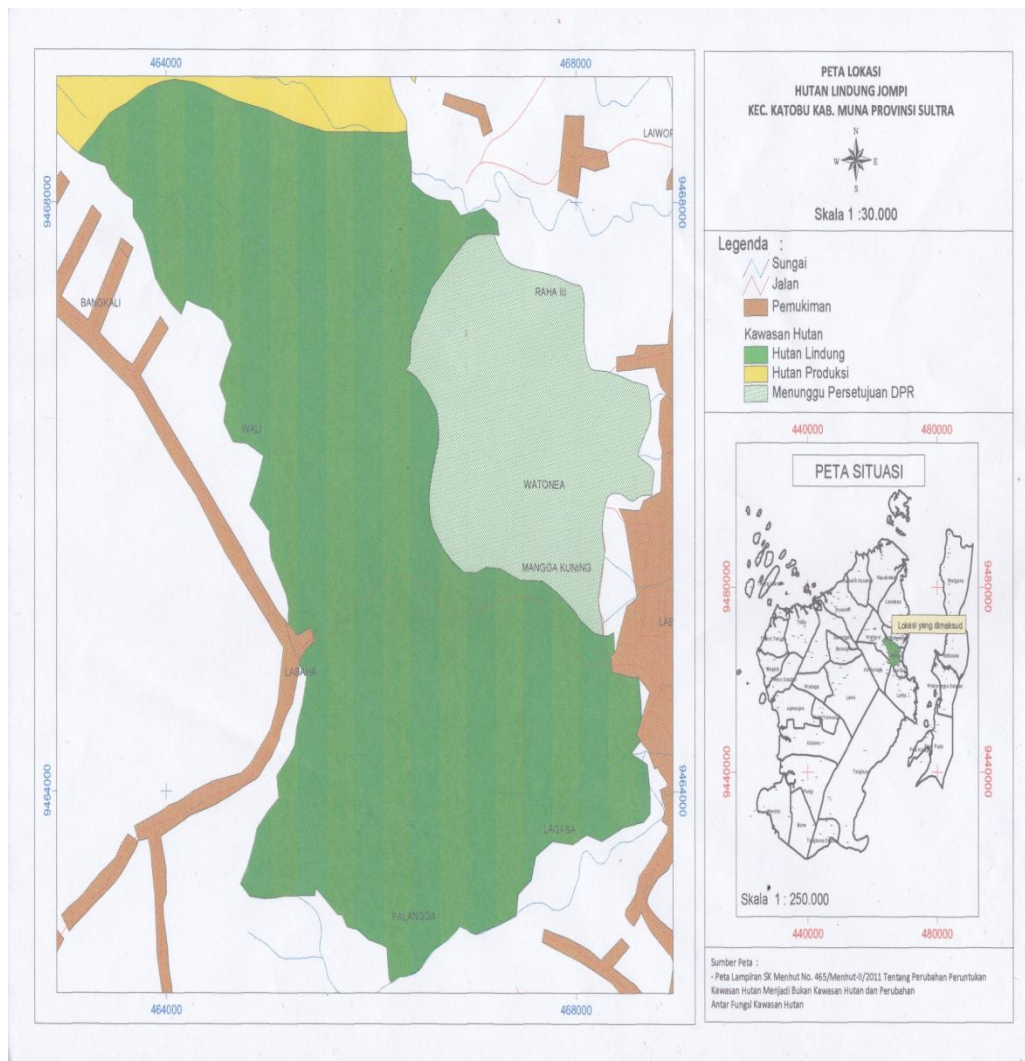


LAMPIRAN

PETA KAWASAN HUTAN KABUPATEN MUNA



PETA KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI



HALAMAN KANTOR DINAS KEHUTANAN KABUPATEN MUNA



PENEBAANGAN LIAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI



LAHAN PERKEBUNAN DALAM KAWASAN HUTAN LINDUNG JOMPI

